



EDISI JUMAT 30 JANUARI 2026

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan



GOVERNMENT TODAY
Bappenas: Makan Bergizi Lebih
Mendesak Dibanding Lapangan Kerja

02
04
10
NUSANTARA
Pramono: Tak Semua Pihak Senang
Jakarta Bebas Banjir

LISTSTYLE
Cara Efektif Menyamarkan Garis Senyum
di Wajah dengan Perawatan yang Tepat

Masalah 'Tahunan' Banjir Jakarta

Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis (29/1/2026) menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota, termasuk kawasan permukiman di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Genangan air merendam rumah warga dan ruas jalan, dipicu tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran sungai dan saluran air, sehingga mengganggu aktivitas warga di berbagai titik Jakarta hari ini. Baca berita lengkap Hal. 4. (Ist.cnbc)

RIUH PEMBATASAN LPG MELON JELANG RAMADAN

Wacana pembatasan pembelian LPG 3 kilogram kembali mengemuka di saat publik bersiap menyambut Ramadan. Usulan PT Pertamina Patra Niaga untuk membatasi pembelian gas melon maksimal 10 tabung per bulan per kepala keluarga (KK) memantik perdebatan, dari ruang rapat parlemen hingga percakapan warga di tingkat pangkalan. Waktu kebijakan yang berdekatan dengan bulan puasa membuat isu ini cepat mengundang perhatian. Pemerintah beralasan pengendalian diperlukan karena konsumsi LPG subsidi terus meningkat dan kerap melampaui kuota. Diketahui realisasi 2025 sekitar 8,51 juta metrik ton dan proyeksi 2026 mencapai 8,7 juta ton. Di sisi fiskal, beban subsidi LPG 3 kilogram pada tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp 87 triliun. Namun, kalangan pengamat meragukan efektivitas pembatasan tersebut. Berkaca pada aturan sebelumnya, penggunaan KTP atau NIK saat pembelian LPG sejauh ini baru berfungsi sebagai pendataan melalui sistem Merchant Apps Pangkalan (MAP). Sebab tak ada aturan tegas yang mlarang kelompok mampu membeli gas melon.

Selain itu, penghapusan sistem pengecer sejak 1 Februari 2025 dan pengalihan distribusi langsung ke pangkalan resmi malah memunculkan kendala akses. BACA HAL 11...



VOLUME KONSUMSI (PENYALURAN)

2014:	Sekitar 4,31 juta metrik ton (MT).
2019 - 2021:	Volume stabil naik dari kisaran 6,8 juta ton hingga mencapai 7,14 juta MT pada 2020.
2023:	Realisasi konsumsi berada di angka sekitar 8,05 juta MT.
2024:	Penyaluran tembus 8,2 juta MT dari kuota awal 8,03 juta MT yang kemudian disesuaikan menjadi 8,3 juta MT.
2025 (Estimasi):	Kuota dipatok sekitar 8,17 juta MT dengan rencana tambahan 370.000 ton untuk kebutuhan akhir tahun.

**NILAI SUBSIDI
(ANGGARAN)**



2020:
Realisasi subsidi sekitar Rp40,25 triliun (171,3% dari pagu awal karena pandemi dan pergeseran konsumsi).



2022:
Melonjak tajam karena kenaikan harga energi global.



2023:
Mencapai angka tertinggi dalam sejarah sebesar Rp117,85 triliun.



2024:
Realisasi penyaluran subsidi mencapai Rp80,9 triliun.



2025:
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87 triliun dalam APBN.



2026 (Target):
Anggaran dipatok sebesar Rp80,3 triliun dengan asumsi konsumsi naik 5%.

BAPPENAS: MAKAN BERGIZI LEBIH MENDESAK DIBANDING LAPANGAN KERJA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa program Makan Bergizi (MBG) saat ini merupakan kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan pembukaan lapangan kerja. Meski demikian, ia menekankan kedua agenda tersebut sama-sama penting dalam kerangka pembangunan nasional jangka panjang.

Pernyataan itu disampaikan Rachmat dalam agenda Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026), merespons perdebatan publik yang kerap mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah antara pemenuhan gizi dan penciptaan kesempatan kerja.

"Pada waktu saya ditanya



Mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting sekali? Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak, daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting. Tetapi MBG lebih mendesak," kata Rachmat.

Ia menjelaskan, urgensi tersebut berkaitan langsung dengan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah pelosok dan daerah tertinggal, yang masih menghadapi persoalan kelaparan dan kekurangan gizi. Dalam situasi demikian, pendekatan

PERBANDINGAN DATA PENERIMA MBG DENGAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

- **Penerima Makan Bergizi Gratis (MBG):** Hingga akhir 2025, program ini telah menjangkau 55,1 juta orang. Jumlah ini terus meningkat dan tercatat mencapai 58,3 juta orang pada pertengahan Januari 2026 dengan target total sasaran sebesar 82,9 juta orang.

- **Jumlah Pengangguran:** Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,46 juta orang.

- **Angkatan Kerja:** Total angkatan kerja di Indonesia hingga pertengahan 2025 tercatat sekitar 153 juta orang (proyeksi dari data Februari 2025 yang mencatat 152,11 juta angkatan kerja dengan 145,7 juta orang bekerja).



Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMAN 2 Kudus, Jawa Tengah, memicu respons cepat dari pemerintah daerah dan Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah. Hingga Kamis (29/1), jumlah korban yang mengalami gejala keracunan tercatat mencapai 117 siswa dan harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.

Para siswa diduga mulai

Ayam Suwir MBG 'Kecut', Diduga Picu 117 Siswa SMAN 2 Kudus Keracunan

merasakan gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG berupa soto ayam dan ayam suwir yang disajikan pada Rabu (28/1). Gejala yang muncul beragam, mulai dari pusing, muntah, diare, hingga sesak napas. Sejumlah siswa bahkan dilaporkan sempat pingsan di lingkungan sekolah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Taj Yasin, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan dan evaluasi menyeluruh terhadap insiden tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memastikan sumber persoalan, baik dari proses pengolahan makanan maupun tahap distribusi.

"Nanti kita akan cek bagaimana penanganannya, kemudian kita evaluasi MBG-nya. Sehingga bisa diketahui permasalahannya di mana, apakah dari proses masak di hulu atau distribusinya," ujar Taj Yasin usai menghadiri Misi Dagang dan Investasi di Hotel PO Semarang, Kamis

(29/1/2026).

Selain mengevaluasi proses penyajian, Satgas MBG Jawa Tengah juga akan menelusuri aspek perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas penyediaan menu tersebut. Taj Yasin menegaskan, pemeriksaan mencakup kelengkapan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Diinvestigasi nanti bagaimana izinnya," tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Mustiko, menyampaikan bahwa jumlah korban dugaan keracunan terus bertambah hingga mencapai 117 siswa, terdiri dari 30 siswa laki-laki dan 87 siswa perempuan. Sebagian besar korban menjalani rawat jalan, sementara lainnya sempat dirawat di rumah sakit.

"Korban 117 orang diduga keracunan. Gejalanya pusing, muntah, diare, ada juga yang sesak napas," ujar Mustiko dalam pesan singkat. (wid,ist/dya)

pembangunan jangka panjang seperti penciptaan lapangan kerja dinilai tidak akan efektif apabila kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi.

Rachmat mencontohkan analogi yang kerap digunakan dalam diskursus pembangunan. Menurutnya, gagasan memberi "kail" alih-alih "ikan" tidak selalu relevan dalam kondisi darurat.

"Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan,"ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat menyoroti masih tingginya angka stunting dan ketimpangan sosial yang melebar. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut perubahan cara pandang pembangunan yang tidak semata bertumpu pada infrastruktur fisik, melainkan juga pembangunan sosial dan kualitas sumber daya manusia.

"Kita lihat anak-anak kita stunting. Sekarang kita tidak hanya harus membangun infrastruktur fisik, jembatan, pelabuhan, kita tidak hanya harus membangun jalan lebih panjang, kita tidak hanya harus membangun digitalisasi lebih, tapi kita sekarang harus membangun secara bersamaan," kata Rachmat.

Menurutnya, pemenuhan gizi melalui program MBG menjadi fondasi awal agar kebijakan pembangunan lain—termasuk pembukaan lapangan kerja—dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Tanpa kondisi kesehatan dan gizi yang memadai, kualitas tenaga kerja nasional juga sulit meningkat.

Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam ajang World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Prabowo bahkan menyinyalung skala ambisius program tersebut.

Dalam pidato kuncinya, Prabowo berkelakar bahwa program MBG Indonesia berpotensi segera melampaui McDonald's (McD) dari sisi jumlah porsi makanan yang disalurkan setiap hari.

"Untuk memberi gambaran, dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, kami akan melampaui McDonald's, yakni 68 juta porsi makanan per hari. Kami memulai program ini pada Januari tahun lalu," kata Prabowo.

Target pemerintah adalah mencapai 82,9 juta porsi makanan per hari, seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat.

Program MBG diinisiasi pemerintah sejak 6 Januari 2025, dengan tahap awal sebanyak 190 dapur yang memproduksi sekitar 570.000 porsi makanan per hari. Seiring berjalaninya waktu, skala program terus diperluas secara masif.

Belakangan, pemerintah mencatat telah membangun 21.102 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Hingga akhir Januari 2026, produksi MBG telah mencapai hampir 60 juta porsi per hari.(wid,tls,ist/dya)



RAPAT DENGAN DPR, ESDM SEBUT 313 WILAYAH TAMBANG RAKYAT DITETAPKAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 313 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di sejumlah provinsi sebagai bagian dari langkah penataan pertambangan nasional. Penetapan ini menjadi titik krusial bagi pemerintah daerah karena tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, keputusan penetapan wilayah pertambangan rakyat dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap usulan pemerintah provinsi.

Persetujuan ini merupakan

bagian dari Rencana Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025, yang dikonsultasikan dengan DPR RI sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Penetapan wilayah pertambangan ini ditunggu oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyesuaian rencana tata ruang," ujar Yuliot usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Kamis (29/1/2026).

Menurut Yuliot, penetapan wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah

Sejumlah kapal ponton isap melakukan penambangan bijih timah ilegal di perairan Teluk Kelabat Dalam, Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (26/1/2025). (ANTARA)

Dasar Hukum

- UU No. 2 Tahun 2025
(Perubahan keempat UU Minerba)
- PP No. 25 Tahun 2023
- Rencana Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025

Hasil Evaluasi Daerah

- Sumatera Barat:
Usulan 332 blok WPR
Disetujui 121 blok
- Kalimantan Tengah:
Usulan perubahan 129 blok WPR
- Sulawesi Utara:
Usulan revisi 63 blok WPR
- Sumatera Utara:
Tidak mengajukan penambahan
Tetap 9 blok WPR yang ditetapkan sejak 2022

Ketentuan Penting

Perubahan wilayah pertambangan maksimal 1 kali dalam 5 tahun

Izin Tambang Tetap Berlaku

Penetapan WPR tidak menghapus izin yang sudah ada IUP, IPR, IUPK, dan SIPB tetap berlaku

pusat setelah menerima usulan dari pemerintah provinsi, yang sebelumnya dikonsultasikan dengan bupati dan wali kota di daerah dengan potensi mineral dan batu bara. Proses ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023.

Hasil verifikasi dan evaluasi pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan jumlah usulan daerah. Di Sumatera Barat, gubernur mengajukan 332 blok wilayah pertambangan rakyat. Namun, setelah evaluasi lapangan dan administrasi, hanya 121 blok yang disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penetapan ini merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 107.K/MB.01/MEM.B/2022, yang sebelumnya menetapkan wilayah pertambangan di Sumatera Barat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat legalitas pertambangan rakyat sekaligus meminimalkan konflik lahan dan dampak lingkungan.

Di Kalimantan Tengah, gubernur mengusulkan perubahan terhadap 129 blok wilayah pertambangan rakyat yang telah diverifikasi sebelumnya. Sementara di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi mengajukan revisi terhadap 63 blok WPR.

Berbeda dengan provinsi lain, Gubernur Sumatera Utara tidak mengajukan penambahan wilayah baru. Provinsi ini saat ini memiliki sembilan blok WPR yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 106.K/MB.01/MEM.B/2022 dan akan kembali ditetapkan jika tidak ada usulan perubahan.

"Gubernur Sumatera Utara belum mengajukan penambahan WPR dan tercatat sembilan blok WPR yang telah ditetapkan pada 2022, dan akan ditetapkan kembali apabila tidak ada usulan perubahan," ujar Yuliot.(gus,ist,kum/dya)

Tekankan Keberpihakan pada Pengusaha Lokal

DEWAH Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan agar pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) benar-benar berpihak kepada pengusaha lokal dan masyarakat sekitar wilayah tambang.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, penetapan wilayah pertambangan rakyat dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap usulan pemerintah provinsi.

Proses ini mengacu pada Rencana Penyesuaian Wilayah Pertambangan Tahun 2025 dan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Penetapan wilayah pertambangan ini ditunggu oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyesuaian rencana tata ruang," ujar Yuliot usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Kamis (29/1).

Ia menegaskan, penetapan ini tidak menghapus atau mengurangi izin yang telah ada, termasuk IUP, IPR, IUPK, maupun SIPB yang masih berlaku.

Sejalan dengan penetapan ESDM, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Gulam Mohamad Sharon, mendorong

Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menegaskan bahwa WPR harus menjadi kebijakan strategis yang memperkuat kemandirian daerah. Menurutnya, WPR tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi harus benar-benar berpihak pada pengusaha lokal dan masyarakat sekitar tambang.

"Negara harus hadir memastikan WPR menjadi alat pemerataan ekonomi. Jika tidak berpihak kepada pengusaha lokal, tujuan WPR akan melenceng dan hanya memindahkan praktik tambang ilegal menjadi tambang berizin tanpa keadilan," tegas Beniyanto.

Ia menjelaskan, filosofi dasar penetapan WPR adalah memberikan ruang legal, aman, dan berkeadilan bagi pertambangan rakyat. Dalam implementasinya, pemerintah wajib memastikan pengelolaan WPR diprioritaskan bagi pengusaha daerah, koperasi lokal, dan pelaku usaha rakyat setempat, bukan dikuasai pihak luar yang tidak memiliki keterikatan sosial dengan wilayah tersebut.

Penyederhanaan Izin Tambang

Selain itu, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Gulam Mohamad Sharon, mendorong

Kementerian ESDM menyederhanakan mekanisme perizinan WPR agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara legal dan berkelanjutan. Sharon menyoroti rumitnya prosedur perizinan yang dihadapi penambang rakyat, sehingga legalitas tambang sulit dicapai meski wilayahnya telah ditetapkan.

"Pada prinsipnya masyarakat ingin bekerja secara benar dan legal. Tetapi ketika proses perizinannya terlalu rumit, tujuan WPR sebagai solusi tambang rakyat menjadi tidak efektif," ujar Sharon usai rapat kerja dengan Kementerian ESDM.

Ia menekankan bahwa penyederhanaan izin tidak berarti melemahkan penegakan hukum, melainkan memperkuat kepatuhan dan mengurangi praktik pertambangan ilegal.

Sharon menambahkan, DPR akan terus mengawal pembahasan penyesuaian wilayah pertambangan dan sistem perizinannya agar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan keberpihakan pada masyarakat. Penetapan WPR harus dibarengi dengan kebijakan yang aplikatif agar regulasi yang baik di atas kertas bisa dijalankan di lapangan. (wid,ist,kum/dya)

PRAMONO: TAK SEMUA PIHAK SENANG JAKARTA BEBAS BANJIR

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya mempercepat penanganan banjir di Ibu Kota di tengah masih tingginya intensitas hujan hingga awal Februari 2026. Fokus utama diarahkan pada Kali Cakung Lama dan Sungai Ciliwung. Di saat bersamaan, ia mengakui bahwa tidak semua pihak merasa senang dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan risiko banjir, termasuk kebijakan yang telah dijalankan selama setahun masa kepemimpinannya.

Dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta, Pramono menyebut dinamika pro dan kontra merupakan konsekuensi dari setiap kebijakan publik yang diambil. Ia bahkan secara terbuka menyatakan ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Jakarta benar-benar terbebas dari banjir.

"Saya bilang, apa yang saya lakukan tentunya ada yang senang, ada yang enggak senang. Termasuk modifikasi cuaca. Enggak semuanya orang itu senang bahwa Jakarta enggak banjir. Itu juga ada yang ingin Jakarta banjir," ujar Pramono dikutip Kami (29/1/2026).

Salah satu kebijakan yang sempat menuai kritik tajam adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Meski mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, Pramono menegaskan langkah tersebut diambil semata-mata



Penumpang TransJakarta di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, terpaksa turun dari bus terdampak banjir, Kamis (29/1). (antara)

untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.

"Modifikasi cuaca yang kami jalankan dikritik, enggak apa-apa. Tetapi kan yang saya lakukan ini adalah untuk kepentingan

masyarakat, kepentingan publik," katanya.

Memasuki satu tahun masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta, Pramono mengaku memilih gaya kepemimpinan yang tenang dan

DAFTAR LOKASI BANJIR TERPARAH (BPBD DKI JAKARTA)

- **Cawang, Jakarta Timur:** Merupakan salah satu titik terparah dengan ketinggian air mencapai 140 cm hingga 150 cm di wilayah pemukiman.
- **Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat:** Genangan air terpantau setinggi 90 cm atau hampir satu meter.
- **Jalan D.I. Panjaitan, Jatinegara:** Terendam banjir setinggi 50 cm, yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total dan banyak sepeda motor mogok.
- **Jalan Daan Mogot, Cengkareng:** Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 50 cm, khususnya di sekitar Halte Jembatan Gantung, Halte Taman Kota, dan depan Samsat Jakarta Barat.
- **Jalan Cakung-Cilincing:** Terendam air setinggi 50 cm, memicu kemacetan panjang di area tersebut.
- **Cempaka Putih, Jakarta Pusat:** Dilaporkan juga mengalami genangan akibat curah hujan tinggi sejak dini hari.



PJJ-WFH Diperpanjang hingga 1 Februari

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah serta work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dan pekerja perkantoran hingga 1 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil menyusul masih tingginya curah hujan dan potensi banjir yang diperkirakan akan terus terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan itu didasarkan pada hasil pemantauan dan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan intensitas hujan masih akan tinggi hingga awal Februari.

"Dari hasil BMKG, kemungkinan besar curah hujan masih tinggi sampai dengan tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari," kata Pramono saat meninjau kawasan Sungai Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1).

Menurut Pramono, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk mengurangi risiko banjir serta dampak lanjutnya akibat cuaca ekstrem, termasuk kemacetan, gangguan aktivitas warga, dan potensi

keselamatan masyarakat. Ia menegaskan, hujan dengan intensitas tinggi masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Selain memperpanjang PJJ dan WFH, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah lanjutan berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pramono menyebut, OMC akan kembali dilakukan apabila diperlukan untuk menekan intensitas hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Di sisi lain, hujan deras yang mengguyur wilayah hulu dan Jakarta turut berdampak pada kenaikan tinggi muka air di sejumlah pintu air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat Bendung Katulampa, Bogor, berstatus waspada atau siaga 3 pada Kamis malam.

"Kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, menginformasikan bahwa pada pukul 19.00 WIB, ketinggian Bendung Katulampa 120 cm gerimis," demikian keterangan BPBD DKI Jakarta melalui akun resmi di media sosial.

BPBD mengimbau warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, khususnya aliran Sungai Ciliwung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati terhadap potensi banjir kiriman dari wilayah hulu.

Kondisi cuaca ekstrem ini turut memicu banjir di sejumlah wilayah

Jakarta. Hingga Kamis malam, banjir dilaporkan merendam puluhan rukun tetangga (RT) serta menggenangi sejumlah ruas jalan utama. Genangan air menyebabkan gangguan lalu lintas di beberapa titik, termasuk di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan terus memantau perkembangan cuaca, kondisi pintu air, serta dampak banjir di lapangan. Sejumlah langkah darurat dan jangka menengah disiapkan, mulai dari pengendalian aliran air, kesiapsiagaan pompa, hingga normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir berulang.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia, M. Aziz Muslim, menilai banjir yang kembali merendam Jakarta merupakan akumulasi persoalan tata kota yang telah berlangsung lama dan belum ditangani secara terintegrasi. Menurut dia, persoalan banjir tidak bisa dilepaskan dari perubahan tata ruang dan alih fungsi lahan yang terus terjadi dari waktu ke waktu.

"Kita bisa melihat persoalan ini muncul karena kurang terintegrasi perencanaan tata ruang, pengelolaan air, serta pengelolaan infrastruktur. Hal ini diperparah dengan alih fungsi lahan dan perubahan penggunaan lahan yang akhirnya memperburuk situasi," ujar Aziz. (tin,kcm,kum/dya)

berorientasi pada penyelesaian persoalan secara konkret. Ia menekankan fokus utamanya adalah menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang belum rampung dari pemerintahan sebelumnya.

"Maka kalau dilihat apa yang saya lakukan, semua kebijakan-kebijakan gubernur yang lama, Gubernur DKI Jakarta maksudnya, yang tidak selesai, bismillah saya selesaikan," ucapnya.

Sejumlah proyek lama yang sebelumnya terbengkalai kini mulai menunjukkan kemajuan, mulai dari pembongkaran tiang monorel yang mangkrak, pembangunan jembatan penghubung Jakarta International Stadium (JIS)-Ancol, hingga penyelesaian sengketa lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Selain itu, Pramono juga menyebut penataan masyarakat adat Betawi terus diupayakan sesuai aspirasi tokoh-tokoh Jakarta terdahulu sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang berpikir jangka panjang. (gus,ist,kum/dya)

PLENO KILAT PBNU: GUS YAHYA DIPULIHAKAN SEBAGAI KETUA UMUM, MUKTAMAR DIGELAR JULI

Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar secara hibrida pada Kamis (29/1) malam menjadi titik balik dari polemik panjang di tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Forum tertinggi harian PBNU tersebut secara resmi memutuskan pemulihkan posisi KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU. Ini sekaligus mencabut sanksi pemberhentian yang sebelumnya dijatuhkan dalam Rapat Pleno 9 Desember 2025.

Rapat Pleno dipimpin langsung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang dinilai krusial bagi konsolidasi organisasi. Salah satu keputusan utama adalah diterimanya permohonan maaf terbuka Gus Yahya terkait sejumlah persoalan manajerial yang sempat memicu ketegangan internal.

"PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas," ujar KH Miftachul Akhyar saat membacakan keputusan Rapat Pleno.

Atas dasar tersebut, forum memutuskan untuk meninjau kembali dan membatalkan—atau me-



nasakh—sanksi pemberhentian terhadap Gus Yahya. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan menjaga keutuhan jam'iyah, stabilitas organisasi, serta kemaslahatan umat.

Seiring dengan pemulihannya

Ketua Umum, KH Zulfa Mustofa secara resmi mengembalikan mandatnya sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Struktur kepengurusan PBNU pun dikembalikan ke susunan hasil Muktamar ke-34 NU, sebagaimana

telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2024.

Keputusan Pleno ini menutup rangkaian ketegangan yang sebelumnya bermula dari polemik pencantuman nama Rais Aam secara sepahak dalam undangan peringatan Harlah ke-100 NU, serta sejumlah catatan terkait tata kelola administrasi dan keuangan organisasi.

Sebelum Pleno digelar, Gus Yahya sempat menghadap langsung Rais Aam PBNU dan menyatakan kesediaannya menempuh mekanisme organisasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Katib PBNU, KH Ahmad Tajul Mafakhir, mengonfirmasi bahwa kesediaan itu disampaikan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat berupa surat permohonan maaf resmi kepada Rais Aam dan jajaran Syuriyah.

"Kesediaan itu disampaikan Gus Yahya saat menghadap Rais Aam kemarin sore. Beliau juga bersedia memenuhi syarat dengan terlebih dahulu membuat surat permintaan maaf kepada Rais Aam dan jajaran Syuriyah," ujar Gus Tajul di Surabaya, Kamis (29/1).

Menurut Gus Tajul, pertemuan tersebut sempat berlangsung alot, terutama terkait agenda Harlah NU yang kala itu dinilai sulit ditunda karena persiapan teknis telah berjalan. Namun, Rais Aam tetap menegaskan bahwa prosedur organisasi tidak bisa dilangkahi.(wid,inr,rls/dya)

Harlah 1 Abad di Stadion GBK 31 Januari?

Organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU) menggelar peringatan hari lahir ke-100 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu (31/1).

"Mari bersama-sama mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. 100 tahun Nahdlatul Ulama," tulis Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam X-nya @YahyaCStaquf, dikutip Kamis (29/1).

Dalam poster acara yang dibagikan Yahya, acara itu digelar di Stadion GBK, Jakarta pada Pukul 06.00 sampai 12.00 WIB.

Acara itu mengusung tema 'Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia'.

Poster tersebut juga melampirkan foto Yahya dan Rais Aam PBNU KH Miftakhl Akhyar serta Presiden RI Prabowo Subianto di tengah foto mereka.

Meski begitu belum ada pernyataan resmi baik dari PBNU maupun Istana Kepresidenan apakah Prabowo akan hadir ke acara tersebut.

Yahya mengajak seluruh kaum Nahdliyin untuk mengawal kemajuan Indonesia ke depan. Ia merasa bangga bisa terlahir sebagai bagian dari

Nahdliyin.

"Dengan begitu, warga Indonesia, lahir sebagai manusia yang tersambung sanadnya hingga Kanjeng Nabi Muhammad saw., dan lahir sebagai manusia yang terus-menerus engage," ujar dia.

NU sendiri lahir pada 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah.

Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini didirikan oleh para ulama, dua di antaranya adalah KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Chasbullah.

Reorientasi dan Regenerasi

Pengamat sosial politik Universitas Brawijaya, Dr. Moh. Muzakki, mengajak warga NU—khususnya generasi muda—untuk melihat abad kedua NU bukan semata sebagai perayaan sejarah, melainkan momentum keberanian menata ulang arah gerakan.

Muzakki mengawali paparannya dengan nada personal. Ia mengaku merasakan kerinduan ketika menyaksikan forum-forum diskusi anak muda NU kembali hidup. Baginya, ruang dialog semacam ini pernah menjadi denyut utama dinamika NU di

masa lalu..

"Saya rindu forum semacam ini. Dulu NU sangat produktif dengan diskusi dan perdebatan gagasan," ujarnya, Minggu (25/1).

Menurut Muzakki, forum diskusi publik memiliki peran strategis untuk memandang NU secara lebih utuh. NU tidak cukup dilihat sebagai organisasi struktural semata, melainkan sebagai gerakan sosial-keagamaan yang dibentuk oleh gagasan, keberianan sikap, dan peran tokoh-tokohnya dalam berbagai fase sejarah bangsa.

Dari refleksi tersebut, Muzakki menegaskan setidaknya tiga agenda besar yang perlu terus dijuangkan NU ke depan: reorientasi gerakan, refleksi ulang arah perjuangan, dan regenerasi kepemimpinan.

Dalam kacamata ekonomi politik, ia menilai NU merupakan organisasi dengan potensi yang nyaris tak



tertandingi di Indonesia. Jaringan kelembagaan NU tersebar luas, basis massanya besar, dan pengaruh sosialnya menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

"Kalau kita lihat, hampir tidak ada sektor yang tidak disentuh NU. Lembaga apa yang tidak ada di NU?" katanya.(wid,tim,ist/dya)

Tampung PKL Alun-alun Merdeka, DPRD Buka Opsi Pembebasan Lahan

MALANG- DPRD Kota Malang membuka opsi pembebasan lahan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di sekitar Alun-alun Merdeka. Langkah ini untuk menjawab persoalan penataan pedagang yang tak kunjung tuntas.

"Dengan kondisi Alun-alun Merdeka yang sudah dibuka kembali pasca-revitalisasi, pasti akan menarik lebih banyak pengunjung. Memang butuh penataan PKL yang konkret," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus, dikutip pada Kamis (29/1/2026).

Dikatakannya, legislatif akan mengawali proses penataan PKL tersebut bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Trio menilai, penataan PKL tidak bisa dilakukan secara parsial dan harus melibatkan sejumlah OPD terkait.

Menurutnya, koordinasi perlu dilakukan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

"DLH kan punya kewenangan

terkait kawasan alun-alun, lalu Diskopindag nanti melihat lokasi-lokasi mana yang memang memungkinkan untuk digunakan PKL," jelasnya.

Lebih lanjut, Trio mendorong Pemkot Malang untuk menyediakan satu lokasi khusus bagi PKL di sekitar Alun-alun Merdeka. Lokasi tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata, baik wisata kuliner maupun wisata belanja.

DPRD, sambung Trio, juga membuka peluang pemanfaatan lahan di sekitar kawasan Alun-alun Merdeka selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan. Bahkan, opsi pembebasan lahan dinilai layak dipertimbangkan apabila memang dibutuhkan untuk kepentingan publik.

"Kalau memang perlu pembebasan tanah, kami dari dewan mendukung. Kalau ada lahan kosong yang bisa dibeli, kenapa tidak?" kata Trio.

Ia mencontohkan, pembebasan lahan untuk kepentingan umum sebelumnya telah dilakukan Pemkot Malang, salah satunya untuk penyediaan lahan parkir. Oleh karena



Ilustrasi: Masyarakat ramai memanfaatkan ruang publik Alun-alun Merdeka pasca revitalisasi, Kamis (29/1/2026). (Santi/Lentera)

itu, menurut Trio, tidak ada alasan jika kebijakan serupa tidak dapat diterapkan dalam rangka penataan PKL di kawasan strategis kota.

Selain pembebasan lahan, Trio juga mengungkapkan sebelumnya sempat muncul usulan penataan PKL dengan memaksimalkan aset milik Pemkot Malang. Sejumlah aset daerah dinilai masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai lokasi usaha PKL tanpa harus menjauhkan mereka dari pusat keramaian.

"Seperti aset Pemkot yang sekarang digunakan Ramayana di Jalan Merdeka, itu kan aset pemerintah. Atau lokasi lain di sekitar sini yang memungkinkan untuk dibebaskan, supaya PKL tidak jauh-jauh dari alun-alun," paparnya.

Ke depan, pihaknya memastikan akan terus mengkaji bersama Pemkot Malang terkait konsep penataan PKL di kawasan Alun-alun Merdeka. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pasca revitalisasi kawasan tersebut. (Santi/Dya)

Bocoran Titik Exit Tol Malang-Kepanjen Pemkot Sebut Pakisaji dan Bululawang Strategis



Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar. (Santi/Lentera)

"Yang jelas nanti di arah Bululawang itu pasti ada. Kemudian di Pakisaji. Kemudian juga kemungkinan exit tolnya ada di Kepanjen," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, penempatan exit tol di Bululawang dinilai strategis karena dapat mengakomodasi akses masyarakat dari wilayah Kecamatan Turen hingga Dampit. Akses tersebut diharapkan mampu mempercepat mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa dari dan menuju Malang Selatan.

Selain itu, Budiar menjelaskan jalur keluar tol juga dirancang untuk mendekatkan akses ke kawasan Gondanglegi-Bantur maupun ke jalur lingkar selatan (JLS). Bahkan tidak menutup kemungkinan exit tol akan

terkoneksi langsung dengan kawasan sekitar SMA Taruna Nusantara yang terletak di Kecamatan Pagak.

Ia menilai keberadaan exit tol di kawasan tersebut sangat dibutuhkan. Mengingat tingginya aktivitas masyarakat, termasuk mobilitas orang tua siswa. Budiar mengungkapkan, hampir setiap akhir pekan orang tua siswa SMA Taruna Nusantara datang menjenguk anak-anak mereka.

"Pengalaman saya sendiri, anak saya sekolah di sana. Orang tua siswa itu setiap minggu pasti datang. Jadi akses cepat sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Sementara terkait trase jalan tol, Budiar menegaskan rute utama tetap direncanakan melalui Malang-Bululawang menuju Kepanjen, dengan detail trase sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Budiar optimistis pembangunan tol Malang-Kepanjen dengan exit yang tersebar di titik strategis akan mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Malang, khususnya wilayah selatan yang kini dinilai telah berkembang pesat.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada kepastian terkait jadwal pengerjaan proyek tol tersebut. Budiar menyebut pihaknya masih menunggu agenda lanjutan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Sebelumnya disampaikan awal 2026, tapi sampai sekarang belum ada agenda pasti," jelasnya.

Budiar menuturkan, proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen sejatinya merupakan program nasional yang telah masuk dalam rencana strategis (renstra) sejak 2019. Namun pelaksanaannya mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, hingga efisiensi anggaran pemerintah pusat.

"Harapan kami, feasibility study (FS) ulang bisa selesai tahun ini, tender juga tahun ini, sehingga pengerjaan bisa dilakukan pada 2027," ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Malang juga telah menugaskan Dinas PU Bina Marga untuk berkoordinasi langsung ke Jakarta guna menanyakan kesiapan proyek tol tersebut. (Santi/Dya)

MALANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengungkap rencana sejumlah titik strategis exit tol Malang-Kepanjen. Hal tersebut disiapkan untuk memperkuat konektivitas wilayah Malang bagian selatan. Mulai dari mendukung akses menuju kawasan pendidikan, layanan publik hingga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

CHINA EKSEKUSI MATI 11 TOKOH KUNCI SINDIKAT SCAM MYANMAR

Pemerintah China menunjukkan sikap keras terhadap kejahatan siber lintas negara. Pada Kamis (29/1/2026), Beijing mengeksekusi mati 11 orang yang dinyatakan sebagai tokoh kunci jaringan penipuan daring berskala besar yang berbasis di wilayah perbatasan Myanmar. Kejahatan mereka disebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial fantastis, tetapi juga merenggut nyawa puluhan warga negara China.

Eksekusi tersebut dilaksanakan setelah Pengadilan Rakyat Menengah Kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang, menyatakan seluruh terpidana bersalah atas serangkaian tindak pidana berat, mulai dari penipuan telekomunikasi dan internet, perjudian daring, penahanan ilegal, hingga pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.

Nilai kejahatan yang dihasilkan jaringan ini ditaksir melampaui 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,77 triliun.

Kantor berita pemerintah Xinhua melaporkan bahwa vonis mati terhadap 11 pelaku itu telah dijatuahkan sejak September 2025. Setelah melalui proses banding, Pengadilan Tinggi secara resmi menolak permohonan para terpidana pada November 2025 dan memerintahkan agar hukuman



Orang-orang berdiri berjajar di pengadilan, dikelilingi oleh petugas keamanan saat anggota mafia Ming dijatuhi hukuman. (dok.tmc)

dieksekusi sesuai ketentuan hukum.

Hukuman mati tersebut juga telah memperoleh persetujuan Mahkamah Agung Rakyat China di Beijing, yang menilai bukti-bukti kejahatan sejak 2015 bersifat "konklusif dan cukup".

Di antara para terpidana, terdapat

anggota dari kelompok kriminal yang dikenal sebagai "keluarga Ming". Dua tokoh sentral jaringan ini, Ming Guoping dan Ming Zhenzhen, disebut sebagai otak operasi sindikat. Bersama mereka, sejumlah anggota inti lain seperti Zhou Weichang, Wu

RI Diminta Tegas Menyikapi Kepulangan WNI Eks Scammer dari Kamboja

Gelombang kepulangan ribuan warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja membuka perdebatan serius di dalam negeri. Mereka adalah WNI yang selama ini terlibat—atau terjebak—dalam jaringan penipuan daring lintas negara (online scam). Di satu sisi, negara dituntut hadir atas nama kemanusiaan. Di sisi lain, penegakan hukum tak boleh dilemahkan.

Data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat, hingga 24 Januari 2026 sebanyak 2.277 WNI telah melapor dan meminta bantuan pemulangan ke Tanah Air. Lonjakan laporan ini terjadi menyusul operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat online scam di berbagai wilayah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa persoalan WNI eks scammer di Kamboja harus dilihat secara proporsional. Menurutnya, ada dua prinsip yang harus berjalan beriringan yaitu perlindungan warga negara dan

penegakan hukum.

"Kasus WNI yang terlibat dalam praktik scam di Kamboja memang menjadi perhatian serius, karena menyangkut nama baik bangsa sekaligus perlindungan terhadap warga negara kita di luar negeri," ujar Dave dalam keterangannya, Kamis (29/1).

Dave menekankan, negara memiliki kewajiban melindungi WNI, khususnya mereka yang menjadi korban eksploitasi atau dijebak dalam jaringan kejahatan siber.

"Di satu sisi, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan memastikan kepulangan mereka dengan aman, terutama bagi yang menjadi korban eksploitasi atau dijebak dalam jaringan kejahatan siber. Prioritas kemanusiaan ini tidak boleh diabaikan," katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa perlindungan negara tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap tindak pidana.

"Di sisi lain, kita juga tidak bisa

menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian WNI memang diduga terlibat aktif dalam tindak pidana penipuan lintas negara," tutur Dave.

La menambahkan, proses hukum harus tetap dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku agar ada kepastian hukum dan efek jera.

"Untuk itu, penegakan hukum tetap harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Aparat penegak hukum berwenang menentukan apakah ada unsur pidana yang bisa dibuktikan, dan langkah hukum harus ditempuh agar ada efek jera serta kejelasan status hukum bagi mereka," tegaskan.

Dave juga mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri yang saat ini fokus melakukan pendataan terhadap WNI di Kamboja.

"Komisi I DPR RI mendukung langkah Kementerian Luar Negeri yang saat ini fokus pada pendataan dan pemulangan, sembari menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang," ucapnya.

Hongming, dan Luao Jianzhang turut menjalani eksekusi mati.

Aktivitas kelompok kriminal keluarga Ming dinilai berkontribusi langsung terhadap kematian sedikitnya 14 warga negara China, serta menyebabkan luka-luka pada banyak korban lainnya. Selain itu, jaringan ini juga terlibat dalam praktik perdagangan manusia, dengan memaksa sebagian korban untuk bekerja di pusat-pusat penipuan daring atau scam parks. (gus,ist,xin/dya)

BEBERAPA KASUS SCAM TERBESAR DAN PALING SIGNIFIKAN

1. Penangkapan Dalang Scam Terbesar: Chen Zhi (Januari 2026)

- Pada awal Januari 2026, otoritas Kamboja menangkap Chen Zhi, yang dijuluki sebagai salah satu dalang jaringan scam paling dicari di Asia.

- Modus: Mengoperasikan jaringan penipuan di 30 negara dengan kedok bisnis properti dan jasa keuangan yang sah.

2. Penipuan Kripto "Dewi Kekayaan" China (November 2025)

- Zhimin Qian, seorang perempuan asal China, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara di London setelah terbukti menguasai lebih dari 61.000 Bitcoin.

- Kerugian: Mencapai lebih dari Rp111 triliun dengan menjerat sekitar 128.000 korban antara 2014-2017 melalui skema investasi fintif.

3. Scam Kripto Industrial & Peretasan Skala Masif (2025)

- Hacker Korea Utara di Bybit: Salah satu pembobolan tunjgal terbesar terjadi pada bursa Bybit yang mengakibatkan kerugian US\$1,46 miliar (sekitar Rp23 triliun) pada Februari 2025, yang diduga dilakukan oleh kelompok peretas dari Korea Utara.

- Jaringan Investasi Europol: Pada Juni 2025, Europol membongkar jaringan penipuan investasi kripto yang mencuri dana hingga US\$540 juta dari 5.000 korban di seluruh dunia menggunakan modus pig butchering.

4. Penipuan Kesehatan Terbesar di AS (Juni 2025)

- Departemen Kehakiman AS membongkar skema penipuan layanan kesehatan dengan total klaim palsu mencapai US\$14,6 miliar (sekitar Rp230 triliun).

- Modus: Melibatkan lebih dari 300 orang, termasuk dokter, yang mengajukan klaim medisifitif.



"Dengan demikian, negara hadir untuk melindungi, tetapi tetap tegas dalam menegakkan aturan. Prinsipnya jelas yaitu perlindungan warga negara adalah prioritas, namun hukum tetap harus ditegakkan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran," tandas Dave. (wud,rla,kum/dya)

MAKANAN KAYA SERAT JAGA JANTUNG SEHAT : ALPUKAT JADI PILIHAN UTAMA

Menjaga kesehatan jantung merupakan hal penting yang perlu dilakukan sejak dini. Salah satu cara utama adalah dengan menerapkan pola makan seimbang, terutama melalui konsumsi buah dan sayuran yang kaya nutrisi.

Asupan serat, lemak sehat, serta mineral esensial menjadi fondasi penting untuk menjaga fungsi jantung tetap optimal sekaligus menurunkan

risiko penyakit kardiovaskular di kemudian hari.

Di antara beragam pilihan makanan sehat, alpukat menjadi salah satu buah yang kian populer dan mudah dijumpai. Buah ini dikenal memiliki manfaat besar bagi kesehatan jantung karena kandungan gizinya yang lengkap.

Menurut ahli jantung sekaligus Direktur Food is Medicine Institute di Friedman School, Tufts University, Dariush Mozaffarian, MD, DrPH, alpukat termasuk dalam kategori makanan terbaik untuk mendukung kesehatan jantung.

Secara botani, alpukat tergolong buah, namun dalam praktiknya sering dikonsumsi dan diolah layaknya sayuran, baik sebagai campuran salad, smoothie, hingga pengganti mentega pada beberapa menu sehat. "Alpukat unggul untuk kesehatan jantung karena kandungannya yang kaya akan lemak sehat," ujar Mozaffarian, dikutip dari Real Simple.

Lemak Sehat

Alpukat mengandung lemak tak jenuh dalam jumlah tinggi yang bermanfaat bagi tubuh. Mozaffarian menjelaskan bahwa lemak tak jenuh terbagi menjadi dua jenis utama, yakni lemak tak jenuh tunggal (monounsaturated) dan lemak tak jenuh ganda (polyunsaturated).

"Lemak tak jenuh ini dibagi dalam dua kelas utama, yakni lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda," ujarnya.

Sebagian besar lemak dalam alpukat merupakan lemak tak jenuh tunggal yang terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat.

Kadar LDL yang tinggi diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Konsumsi alpukat secara rutin dalam porsi yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan kolesterol dalam tubuh sekaligus mendukung kesehatan pembuluh darah.

penyerapan kolesterol ke dalam darah sehingga risiko penumpukan plak di pembuluh darah dapat ditekan.

Kondisi tersebut penting untuk menjaga kelancaran aliran darah serta menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Selain itu, serat juga membantu menjaga kesehatan pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama.

Sumber Kalium

Alpukat juga mengandung kalium, mineral esensial yang berperan besar dalam mengatur tekanan darah. Mozaffarian menyebut kalium mampu menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan efek negatif konsumsi natrium atau garam yang berlebihan.

"Kalium menurunkan tekanan darah dan membantu menetralkan bahaya natrium," ujarnya. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular.

Dengan asupan kalium yang cukup, tubuh dapat menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung kerja jantung yang lebih sehat.

Kaya Antioksidan

Tak hanya itu, alpukat juga mengandung antioksidan yang membantu melawan peradangan dan mencegah kerusakan sel. Antioksidan berperan mencegah oksidasi LDL yang dapat memicu pembentukan plak di

arteri atau aterosklerosis.

Jika dibiarkan, penumpukan plak dapat menghambat aliran darah dan meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. Kandungan antioksidan dalam alpukat membantu menurunkan risiko tersebut sekaligus mendukung kesehatan sel secara keseluruhan.

Meski kaya manfaat, para ahli tetap menyarankan konsumsi alpukat secara seimbang karena kandungan kalorinya yang cukup tinggi. Mengombinasikan alpukat dengan pola makan sehat lainnya, seperti sayur, buah, biji-bijian utuh, serta protein rendah lemak, akan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan jantung.

Dengan memilih makanan kaya serat dan nutrisi seimbang, serta menerapkan gaya hidup aktif, kesehatan jantung dapat terjaga dalam jangka panjang. Selain itu, alpukat juga mudah dipadukan dengan berbagai menu sehari-hari, sehingga cocok dijadikan bagian dari pola makan sehat. (Itqiyah_UINSA berkontribusi dalam penulisan ini)

Alternatif Makanan Kaya Serat Pengganti Alpukat

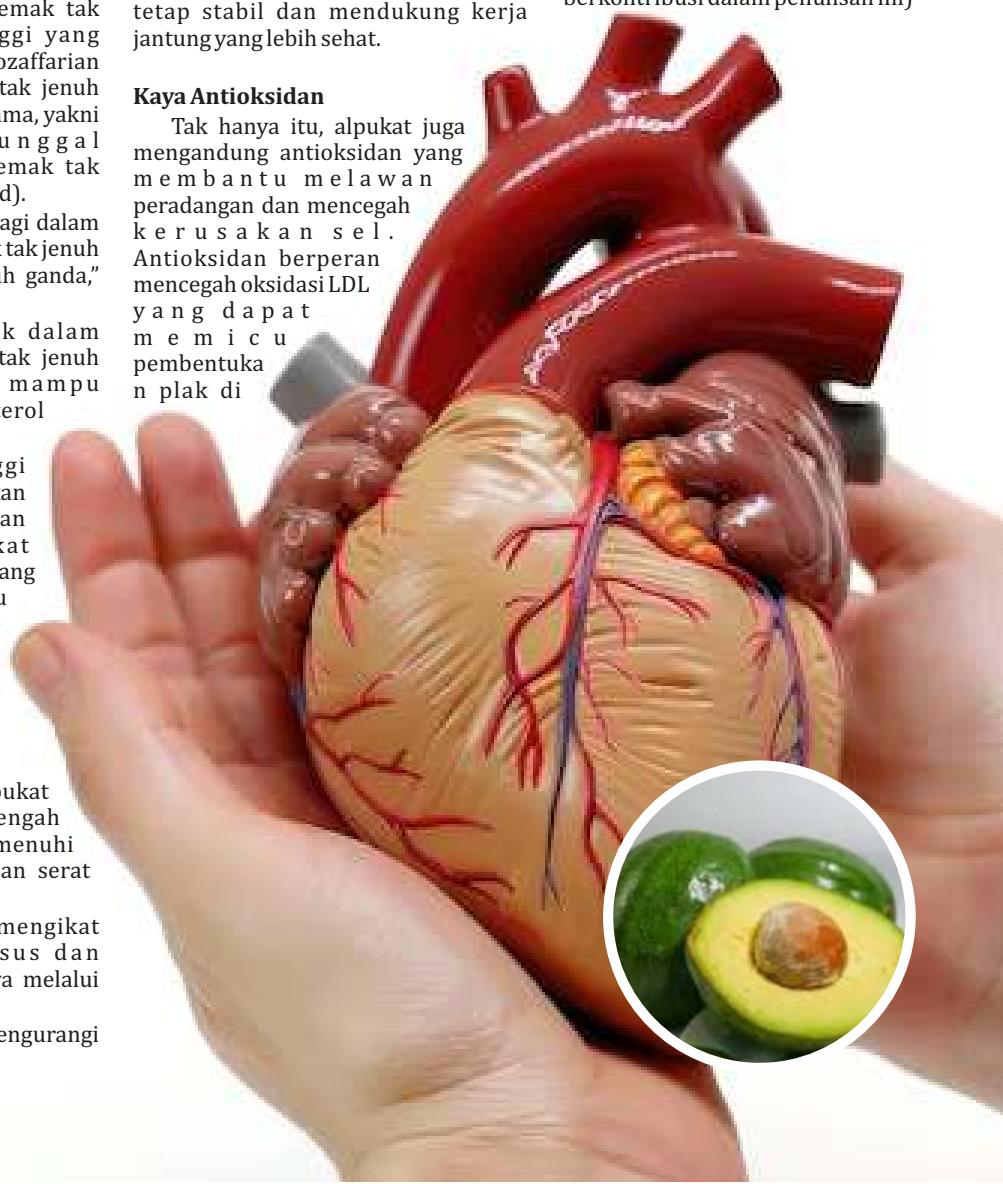


Serat Tinggi

Selain lemak sehat, alpukat juga kaya akan serat. Setengah buah alpukat mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan serat harian tubuh.

Serat larut berperan mengikat kolesterol di dalam usus dan membantu mengeluarkannya melalui sistem pencernaan.

Proses ini membantu mengurangi



Metodologi Baru PBB Ungkap Populasi 'Mega-Jakarta' Tembus 42 Juta Jiwa



Sebuah laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk World Urbanization Prospects 2025 mengejutkan publik global. Jakarta kini resmi menduduki peringkat pertama sebagai kota paling padat penduduk di dunia, menggeser Tokyo yang telah bertahun-tahun meraih daftar Megacities Global.

PBB merilis data yang menempatkan Jakarta sebagai wilayah urban terbesar dengan populasi mencapai 41,9 juta jiwa. Angka ini jauh melampaui Tokyo yang kini "hanya" mencatatkan 33,4 juta penduduk. Lonjakan drastis tersebut terjadi akibat perubahan metodologi perhitungan PBB yang kini mendefinisikan wilayah urban berdasarkan kepadatan fisik dan keterhubungan aktivitas manusia, tanpa lagi terpaku pada batas administratif pemerintahan.

Data ini dikeluarkan dalam laporan prospek urbanisasi dunia yang terbaru. Wilayah yang dihitung

mencakup Jakarta beserta kota-kota satelitnya seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang atau yang dikenal sebagai kawasan Jabodetabek. Dalam perhitungan baru tersebut, kawasan ini dipandang sebagai satu kesatuan urban yang saling terhubung secara ekonomi, sosial, dan mobilitas harian penduduk.

Sementara itu, di posisi kedua, Dhaka, Bangladesh, menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan siap menyulip dalam beberapa tahun mendatang. Kota tersebut kini mencatatkan populasi sekitar 36,6 juta jiwa. Tokyo, yang sebelumnya berada di puncak selama puluhan tahun, harus turun ke posisi ketiga akibat tren penurunan jumlah penduduk yang terus berlangsung.

Pertumbuhan terbesar Jakarta justru terkonsentrasi di wilayah penyangga. Dalam metodologi baru ini, populasi Jakarta bertambah sekitar 30 juta jiwa akibat integrasi kepadatan penduduk dengan daerah pinggiran. Mobilitas komuter yang

tinggi dan perluasan kawasan hunian membuat batas antara pusat kota dan daerah sekitar semakin kabur. Kondisi ini sangat berbeda dengan Tokyo yang mengalami stagnasi bahkan penyusutan populasi, terutama karena rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Jepang.

Perubahan status ini secara resmi tercatat dalam laporan tahun 2025 dan mulai menjadi perhatian luas pada awal Januari 2026. Selama 16 tahun terakhir, Jepang tercatat mengalami penurunan populasi secara konsisten. Sebaliknya, Jakarta dan Dhaka mencatatkan pertumbuhan urban yang eksplosif selama lebih dari 25 tahun terakhir, seiring pesatnya urbanisasi di negara-negara berkembang.

Setidaknya ada dua alasan utama yang melatarbelakangi perubahan peringkat ini. Pertama, metodologi baru PBB yang

mendefinisikan wilayah urban berdasarkan jangkauan bangunan dan aktivitas ekonomi yang tidak terputus, sehingga kawasan Jabodetabek dihitung sebagai satu entitas besar. Kedua, faktor demografi, di mana Jakarta masih mengalami arus urbanisasi yang kuat serta tingkat kelahiran yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara maju seperti Jepang.

Dengan populasi yang mendekati 42 juta jiwa, Jakarta menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketersediaan air bersih, perumahan, hingga sistem transportasi publik. Kepadatan yang tinggi juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Di sisi lain, munculnya Dhaka sebagai pesaing baru di posisi kedua menegaskan pergeseran pusat kepadatan penduduk dunia. Kota-kota besar di negara berkembang kini menjadi episentrum pertumbuhan urban global, menggantikan dominasi kota-kota di negara maju. Fenomena ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan perencana kota untuk menyiapkan strategi pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Para pengamat tata kota menilai perubahan peringkat ini bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan tantangan urbanisasi yang semakin kompleks. Kepadatan penduduk yang tinggi berpotensi memperlebar kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan pemerataan layanan publik. Akses terhadap hunian layak, ruang terbuka hijau, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi isu krusial yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Selain itu, tingginya jumlah penduduk urban juga berdampak langsung pada peningkatan emisi karbon dan beban lingkungan. (Nathasya-UINSA berkontribusi dalam penulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan TODAY

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | MOJOKERTO:
NUR HIDAYAH | LAMONGAN: L HANDI | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | KEDIRI: GATOT SUNARKO | JOMBANG : SUTONO | PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN
SANTOSO | BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO | MADIUN: WIWIET EKO PRASetyo (SERTIFIKASI
WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I
TRENGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL.
RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM**

Wartawan Lentera Today dalam setiap berita dilengkapi dengan tanda pengenal kewbartan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewbartan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI



Cara Efektif Menyamarkan Garis Senyum di Wajah dengan Perawatan yang Tepat

Garis senyum di area pipi dan sekitar mulut memang dapat disamarkan sementara dengan teknik makeup yang tepat. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan tahan lama, perawatan kulit yang sesuai menjadi faktor utama.

Pemilihan skincare yang tepat, dibarengi dengan kebiasaan harian yang mendukung kesehatan kulit, berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit serta membantu mengurangi tampilan garis halus seiring waktu.

Menurut ahli bedah plastik David Shafer, munculnya garis senyum dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas otot wajah yang terjadi secara berulang, perubahan pada struktur kulit, hingga penurunan elastisitas seiring proses penuaan.

Ia menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, garis senyum dapat tampak semakin dalam, terutama jika disertai perubahan berat badan atau gangguan pada struktur gigi. Kondisi gigi yang tidak lagi mampu menopang jaringan wajah secara optimal membuat lipatan kulit di sekitar mulut dan pipi menjadi lebih terlihat.

Beberapa tips dapat dilakukan untuk mengurangi tampilan garis di wajah saat tersenyum. Langkah pertama adalah memilih kandungan skincare yang membantu elastisitas pada kulit. Pemilihan kandungan dalam produk skincare menjadi langkah awal yang krusial untuk membantu menyamarkan garis senyum.

Bahan aktif seperti retinol dan vitamin C dikenal efektif dalam merangsang produksi kolagen, meningkatkan elastisitas, serta

memperbaiki tekstur kulit agar tampak lebih halus. Selain itu, dokter kulit Cindy Yoon Soon Bae menjelaskan bahwa penggunaan retinoid secara rutin juga berperan dalam mengurangi, bahkan mencegah, munculnya garis-garis halus, termasuk yang mulai terbentuk di area sekitar mata.

Langkah selanjutnya adalah melakukan eksfoliasi ringan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang kerap membuat garis senyum tampak lebih tegas. Ketika lapisan kulit mati terangkat, permukaan kulit menjadi lebih halus dan rata, sehingga garis-garis halus pun terlihat lebih samar.

Dokter kulit Cindy Yoon Soon Bae menyarankan penggunaan pembersih wajah atau produk perawatan yang mengandung eksfolian lembut, seperti AHA, agar proses pengelupasan tetap terlihat lebih samar.

Sementara itu, ahli bedah plastik David Shafer juga merekomendasikan bahan aktif seperti asam glikolat, asam laktat, dan asam salisilat yang dikenal efektif membantu memperbaiki tekstur kulit dan menjaga tampilan kulit tetap sehat.

Selain perawatan skincare, pijat wajah juga dinilai memiliki manfaat dalam menjaga kelenturan otot serta melancarkan sirkulasi darah di area pipi dan sekitar mulut, yang merupakan lokasi umum munculnya garis senyum.

Ahli perawatan wajah Yolanda Mata menyarankan agar pijatan dilakukan dengan arah dari bawah ke atas untuk membantu memberikan efek mengangkat pada wajah.

Menurutnya, gerakan pijat

sebaiknya tidak diarahkan ke bawah karena dapat melawan gravitasi alami kulit. Salah satu teknik yang ia rekomendasikan untuk area sekitar mulut dan rahang adalah dengan mengpal kan kedua tangannya, menempatkannya di sisi kanan dan kiri mulut, kemudian menggesernya perlahan ke arah atas mengikuti garis tulang pipi hingga mencapai area pelipis dengan tekanan sedang.

Mata menegaskan bahwa pijat wajah tidak bertujuan menghilangkan garis senyum sepenuhnya, melainkan membantu kulit tampak lebih halus, segar, dan kencang apabila dilakukan secara rutin dan konsisten.

Kondisi garis senyum tidak hanya dipengaruhi oleh perawatan dari luar, tetapi juga oleh kebiasaan harian yang sehat. Pola tidur yang cukup, asupan cairan yang memadai, serta perlindungan kulit dari paparan sinar matahari berperan penting dalam menjaga kesehatan dan elastisitas kulit. Salah satu langkah utama yang tidak boleh dilewatkan adalah penggunaan tabir surya secara rutin, termasuk untuk membantu menyamarkan tampilan garis senyum.

Dokter kulit Cindy Yoon Soon Bae menjelaskan bahwa pemakaian tabir surya setiap hari dapat membantu mempertahankan kolagen alami kulit sekaligus mencegah garis-garis halus menjadi semakin jelas akibat kerusakan yang dipicu sinar ultraviolet.

Menurutnya, penggunaan tabir surya secara rutin setiap hari berperan penting dalam menjaga kolagen alami kulit, sehingga membantu mencegah garis senyum semakin dalam seiring

berjalaninya waktu. Selain perlindungan dari luar, kebiasaan hidup sehat juga memberikan dampak besar terhadap kondisi kulit.

Mencukupi kebutuhan cairan tubuh, menjaga kualitas tidur, serta membatasi konsumsi alkohol dapat membantu mempertahankan elastisitas kulit agar tetap kencang dan tampak lebih sehat. (Inna - UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)

Beberapa Bahan Alami yang Efektif Berdasarkan Data Tahun 2026

Madu

Mengandung antioksidan yang membantu kulit terlihat lebih kenyal (plumpy) dan memperbaiki tekstur kulit di sekitar bibir.

Minyak Zaitun

Kaya akan vitamin E dan C yang dapat membantu memudarkan kerutan. Minyak ini bekerja dengan cara mengunci kelembapan kulit.

Putih Telur

Memiliki kandungan yang membantu mengencangkan kulit secara alami.

Lidah Buaya (Aloe Vera)

Membantu meningkatkan produksi kolagen dan menenangkan peradangan kulit.

Minyak Kelapa

Mengandung asam lemak yang melembapkan kulit secara mendalam dan membentuk lapisan pelindung untuk mencegah dehidrasi.

Riuh Pembatasan LPG ...dari hal 1

Pertamina Patra Niaga mengajukan pembatasan tersebut sebagai respons atas tren konsumsi LPG subsidi yang terus meningkat dan kerap melampaui kuota.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa usulan tersebut tengah dibahas lintas kementerian. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan, pengendalian penyaluran LPG 3 kilogram mempertimbangkan kebutuhan rata-rata rumah tangga yang berkisar satu tabung per minggu.

"Kalau kebutuhan rata-rata kan biasa per rumah tangga itu sekitar satu tabung per minggu. Ya berarti ini kita lihat track record yang ada ya, karena juga ada sistem yang mencatat yang disiapkan oleh Pertamina," kata Yuliot di kompleks parlemen, Kamis (29/1).

Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan ideal rumah tangga sekitar empat tabung per bulan, meski angka itu dapat berbeda antar kelompok desil. Yuliot menegaskan, LPG 3 kilogram ditujukan untuk masyarakat desil 1 hingga 4.

"Masyarakat miskin itu kan berada di desil 1 sampai 4," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah sedang mengonsolidasikan data BPS, kelistrikan, dan data pembelian LPG untuk memastikan ketepatan sasaran.

ESDM juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari batas anggaran subsidi. "Ada penetapan berapa ini anggaran subsidi yang dialokasikan dalam setahun, jadi ini tidak boleh lebih dari anggaran subsidi yang ditetapkan," tutur Yuliot.

Diketahui, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengatakan, berbeda dengan BBM subsidi yang cenderung berada di bawah kuota, penyaluran LPG 3 kilogram justru hampir selalu direvisi naik sejak 2023.

"Dari kuota yang diberikan oleh pemerintah dan kuota revisi, kecenderungannya untuk LPG ini berbeda dengan BBM subsidi. LPG ini cenderung meningkat, bahkan selalu meningkat, selalu direvisi sejak tahun 2023," ujar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).

Tanpa pengendalian, Pertamina memproyeksikan penyaluran LPG 3 kilogram pada 2026 dapat mencapai 8,7 juta metrik ton, naik sekitar 3,2 persen dibandingkan realisasi 2025 sebesar 8,51 juta metrik ton. Proyeksi itu telah memperhitungkan pertumbuhan konsumen rumah tangga, usaha mikro, hingga tambahan konsumen dari kalangan petani.

Sebaliknya, jika pembatasan diterapkan dengan skema maksimal 10 tabung per KK per bulan, penyaluran diperkirakan turun menjadi sekitar 8,29 juta metrik ton

atau menyusut 2,8 persen dari realisasi tahun sebelumnya. "Kalau dari prognosa terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, ini akan meningkat sekitar 300 ton, enggak terlalu banyak," kata Achmad.

Atas dasar itu, Pertamina meminta dukungan DPR agar pemerintah segera menerbitkan aturan pembatasan LPG subsidi, termasuk pengaturan desil penerima yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007. "Kami mengharapkan dukungan dari bapak dan ibu yang terhormat, bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini," ujarnya.

Dari sisi regulasi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut peraturan presiden baru yang mengatur pembatasan LPG 3 kilogram ditargetkan rampung paling lambat semester I-2026. Ia memastikan akan ada masa transisi dan uji coba terbatas sebelum kebijakan diterapkan secara nasional.

"Ada masa transisi dan kita siapkan rencana piloting, misal di Jakarta dulu, Jakartanya juga misalnya di Jaksel dan Jakut dulu," kata Laode.

Menurut dia, seluruh upaya diarahkan agar LPG subsidi lebih tepat sasaran, mengingat kuota 2026 berada di bawah tingkat konsumsi 2025.

Namun, rencana pembatasan ini tidak sepenuhnya luput dari kritik. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pembatasan 10 tabung per KK masuk akal sebagai langkah awal, tetapi belum menyentuh akar persoalan.

"Proyeksi konsumsi hanya turun dari sekitar 8,7 juta ton menjadi 8,3 juta ton, sedangkan kuota APBN 2026 ada di 8 juta ton. Artinya pengetatan ini lebih bersifat koreksi ringan, belum perubahan struktural yang benar-benar menggigit," ujar Yusuf.

Ia juga menilai angka 10 tabung masih cukup longgar sehingga kelompok rumah tangga mampu, UMKM, bahkan sebagian pengguna komersial masih berpotensi menikmati LPG subsidi. Menurutnya, sekitar 40 persen LPG 3 kilogram saat ini masih dinikmati kelompok non-miskin.

Risiko di lapangan pun menjadi sorotan. Yusuf mengingatkan potensi praktik "titip KK", jual beli jatah, hingga distribusi informal yang dapat membuat penurunan konsumsi di atas kertas tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi nyata.

"Pengetatan kuota seharusnya dibarengi perbaikan skema subsidi, dari subsidi barang ke subsidi penerima," katanya.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal. Ia menilai keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sistem pengawasan. "Kalau kemudian

diketatkan dengan dikasih kuota masing-masing orang itu salah satu yang bagus, tetapi kuncinya tetap sama seperti kemarin adalah dari pemantauan implementasinya," ujarnya.

Faisal juga mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi agar pembatasan tidak memicu kepanikan masyarakat, seperti kelangkaan, antrean panjang, atau spekulasi di tingkat pengecer.

Riuh wacana pembatasan LPG melon ini kian terasa karena waktunya berdekatan dengan Ramadan, periode ketika konsumsi rumah tangga biasanya meningkat. Pemerintah dan Pertamina berupaya menegaskan bahwa kebijakan masih dalam tahap pembahasan dan akan diterapkan bertahap. Namun, bagi sebagian masyarakat, bayang-bayang pembatasan gas subsidi menjelang bulan puasa tetap memunculkan kekhawatiran lama.

Jamin Stok Aman

Pemerintah memastikan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Kepastian itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung usai rapat koordinasi penanganan inflasi 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Rapat di Kemenko Perekonomian pagi tadi membahas penanganan inflasi tahun 2026. Kami juga mengantisipasi kebutuhan Ramadan dan Idulfitri, mulai dari kecukupan BBM, distribusi LPG, hingga kendala listrik," ujar Yuliot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut Yuliot, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar selama periode hari besar keagamaan. Pemerintah menaruh perhatian khusus pada potensi gangguan distribusi di lapangan yang dapat memicu kelangkaan atau kenaikan harga, sehingga berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Ia menegaskan, langkah antisipatif dilakukan agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan nyaman, tanpa kekhawatiran terhadap pasokan energi. "Koordinasi ini penting untuk memastikan tidak ada kendala teknis di lapangan, terutama terkait distribusi bahan bakar dan pasokan listrik di titik-titik krusial," kata Yuliot.

Diketahui, harga LPG di Indonesia per Januari 2026 bervariasi berdasarkan ukuran dan wilayah, dengan LPG 3 kg (subsidi) berkisar Rp18.000-Rp23.000 per tabung di pangkalan/warung, sementara LPG 12 kg non-subsidi berada di kisaran Rp213.000 hingga Rp600.000 untuk tabung dan isi. Harga LPG 3 kg di beberapa tempat dilaporkan mencapai Rp50.000.

Namun di lapangan, kenaikan harga elpiji (LPG) 3 kilogram terjadi di

sejumlah wilayah Indonesia. Diduga terjadi akibat kelangkaan pasokan, terutama pada Januari 2026. Di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, harga LPG 3 kilogram dilaporkan melonjak tajam hingga Rp45.000-Rp50.000 per tabung. Kondisi cuaca buruk yang menghambat distribusi kapal pengangkut gas disebut menjadi penyebab utama tersendatnya pasokan.

Kenaikan serupa juga terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Di sejumlah desa, harga LPG 3 kilogram menembus Rp25.000 per tabung akibat kekosongan stok di tingkat pangkalan. Situasi ini memaksa warga membeli gas dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari HET yang berlaku.

Di wilayah kepulauan, persoalan distribusi kembali menjadi faktor dominan. Di Kepulauan Sumenep, Madura, harga LPG 3 kilogram dilaporkan mencapai Rp50.000 per tabung setelah pasokan terhenti. Kendala transportasi laut dan jarak distribusi yang panjang membuat suplai gas tidak stabil. (gus,ist,kum/dya)

SEJARAH DAN EVOLUSI KEBIJAKAN LPG 3 KG DI INDONESIA

1. Era SBY-JK: Awal Mula Konversi

2007: Program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg diluncurkan, target 20 juta keluarga miskin.

2007-2010: Masa adaptasi sulit, banyak insiden "LPG meledak" akibat minimnya edukasi.

2. Era Jokowi-JK: Keberhasilan dan Uji Coba Subsidi

2015: Penurunan Konsumsi Minyak Tanah Program konversi dianggap sukses besar secara angka. Konsumsi minyak tanah nasional turun drastis dari 9,85 juta KL pada tahun 2007 menjadi hanya 850 ribu KL pada tahun 2015.

2016: Uji Coba Subsidi Tertutup Kementerian ESDM mulai melakukan uji coba penerapan subsidi tertutup untuk LPG 3 kg agar penyaluran lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

3. Era Jokowi-Ma'ruf Amin: Pendataan Nasional

2020: Kajian Subsidi Tertutup Pemerintah masih terus mengkaji mekanisme subsidi yang paling efektif. Kendala utama yang dihadapi pada masa ini adalah masalah akurasi data penerima manfaat.

2024: Syarat Pembelian Menggunakan KTP Pertamina mulai mewajibkan pembeli LPG 3 kg untuk membawa KTP saat melakukan transaksi di pangkalan atau agen resmi. Tujuannya adalah untuk pendataan digital agar subsidi tidak salah sasaran.

4. Era Prabowo-Gibran: Pengetatan Distribusi

2025: Pembelian Hanya di Pangkalan Resmi Mulai 1 Februari 2025, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa LPG 3 kg tidak lagi tersedia di tingkat pengecer kecil (warung biasa), melainkan hanya dapat dibeli di pangkalan resmi Pertamina. Menteri ESDM Bahill Lahadalia menyatakan langkah ini diambil untuk mencegah penyelewengan di tingkat pengecer.

IHSG LONGSOR DUA HARI, HARTA KONGLOMERAT RI AMBLAS

Gejolak hebat yang melanda pasar saham Indonesia dalam dua hari terakhir tak hanya mengguncang layar perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi juga menggerus nilai kekayaan para orang terkaya di Tanah Air. Ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longgar dan sempat memicu penghentian sementara perdagangan, harta para taipan pun ikut amblas triliunan rupiah.

Pada Rabu (28/1/2026), IHSG longsor lebih dari 7 persen, disusul koreksi lanjutan pada Kamis (29/1/2026) yang kembali menekan indeks lebih dari 1 persen. Tekanan tersebut mencerminkan derasnya arus sentimen negatif yang membayangi pasar modal nasional, termasuk dampak kebijakan lembaga indeks global MSCI.

Data peringkat orang terkaya versi Bloomberg Billionaires Index secara real time menunjukkan, gejolak bursa membuat nilai kekayaan para konglomerat Indonesia bergerak searah dengan kinerja IHSG. Sebagian mencatat penurunan tajam hanya dalam satu hari, sementara sebagian lainnya relatif lebih tahan banting. Namun secara agregat, tekanan pasar saham tetap meninggalkan bekas yang dalam.

Taipan energi dan petrokimia



Prajogo Pangestu menjadi sosok yang paling merasakan dampak koreksi pasar. Total kekayaannya tercatat sekitar Rp754,17 triliun, tergerus sekitar Rp81,8 triliun hanya dalam satu hari. Secara tahun berjalan (year-to-date/ytd), kekayaannya telah

menyusut hingga Rp180,4 triliun.

Penyusutan tersebut mencerminkan tingginya sensitivitas saham-saham berkaptalisasi besar terhadap perubahan sentimen pasar, terutama ketika tekanan datang secara simultan dari faktor global dan

TAIPAN MENGALAMI PENYUSUTAN ASSET TERIMBAS PELEMAHAN IHSG

- **PRAJOGO PANGESTU:** Total kekayaan Rp754,17 T, dengan penurunan harian sebesar Rp81,8 T dan penurunan YTD sebesar Rp180,4 T.
- **LOW TUCK KWONG:** Total kekayaan Rp403,91 T, dengan penurunan harian sebesar Rp11,2 T dan kenaikan YTD sebesar Rp5,02 T.
- **SUKANTO TANOTO:** Total kekayaan Rp368,71 T, dengan kenaikan harian sebesar Rp658 M dan kenaikan YTD sebesar Rp25,1 T.
- **BUDI HARTONO:** Total kekayaan Rp320,11 T, dengan penurunan harian sebesar Rp18,4 T dan kenaikan YTD sebesar Rp40,1 T.
- **MICHAEL HARTONO:** Total kekayaan Rp293,29 T, dengan penurunan harian sebesar Rp16,7 T dan penurunan YTD sebesar Rp38,4 T.
- **ANTHONI SALIM:** Total kekayaan Rp288,26 T, dengan penurunan harian sebesar Rp18,4 T dan kenaikan YTD sebesar Rp55,1 M.
- **DATO SRI TAHIR:** Total kekayaan Rp227,92 T, dengan penurunan harian sebesar Rp7,84 T dan penurunan YTD sebesar Rp8,89 T.
- **HARYANTO TJIPTODIHARDJO:** Total kekayaan Rp186,02 T, dengan penurunan harian sebesar Rp25,1 triliun dan penurunan YTD sebesar Rp40,1 T.
- **OTTO TOTO SUGIRI:** Total kekayaan Rp165,91 T, dengan penurunan harian sebesar Rp10,13 T dan kenaikan YTD sebesar Rp3,22 T.

Peringkat Turun Jadi Underweight, Danantara Singgung Bangladesh-Togo

Tekanan terhadap pasar modal Indonesia kian menguat setelah Goldman Sachs Group Inc. menurunkan peringkat pasar saham Indonesia dari market weight menjadi underweight.

Pemangkasan peringkat ini dilakukan di tengah sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap transparansi free float saham, yang turut memicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga lebih dari 8 persen dan memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan trading halt dua hari berturut-turut.

Chief of Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menilai situasi tersebut sebagai sinyal keras bagi regulator untuk segera berbenah. Ia bahkan mengingatkan risiko penurunan kasta pasar modal Indonesia dari kategori emerging market menjadi frontier market jika dalam beberapa bulan ke depan tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan.

"At the end regulator harus bisa bertindak. Saya lagi baca list frontier market, karena kan, persiapannya ke frontier market sekarang. Ada negara seperti Bangladesh, Burkina Faso, Niger, Pakistan, Senegal, Togo, Tunisia. Mungkin ini cita-cita dari regulasi, saya

enggak tahu," tegas Pandu saat Prasasti Economic Outlook 2026, Kamis (29/1).

Penurunan peringkat oleh Goldman Sachs dinilai berpotensi memicu arus dana keluar dari pasar saham domestik. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Bursa Efek Indonesia (BEI), Irvan Susandy, mengakui bahwa status underweight memiliki konsekuensi langsung terhadap pergerakan modal asing.

"Angka underweight ya, ya konsekuensinya kan outflow," ungkap Irvan di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).

Goldman Sachs dalam analisanya memperkirakan tekanan terhadap pasar saham Indonesia masih akan berlanjut dan belum melihat kondisi saat ini sebagai momentum masuk investasi.

"Kami memperkirakan pasar akan tetap berada di bawah tekanan dan tidak melihat ini sebagai titik masuk," kata para ahli strategi Goldman Sachs, dikutip dari Business Times.

Dalam proyeksinya, Goldman Sachs memperkirakan aksi jual bersih (net sell) di IHSG dapat mencapai US\$ 2,2 miliar. Pada skenario terburuk, arus keluar dana bahkan diprediksi bisa menembus US\$ 7,8 miliar.

Sejalan dengan itu, Pandu

memperkirakan jika IHSG benar-benar turun status menjadi frontier market, maka potensi capital outflow bisa jauh lebih besar, yakni sekitar USD 25-50 miliar. Para analis juga mencatat bahwa dana pasif yang mengikuti indeks MSCI berpotensi melepas saham hingga USD 7,8 miliar, sementara tambahan arus keluar senilai USD 5,6 miliar dapat terjadi apabila FTSE Russell meninjau ulang metodologi free float dan status pasar Indonesia.

Meski vokal, Pandu menegaskan Danantara tidak berada pada posisi pembuat kebijakan. Sebagai investor, pihaknya hanya bisa mendorong terciptanya pasar modal yang lebih sehat dan berstandar global.

"Buat kami di Danantara, fokus kami berinvestasi. Tentu salah satunya di public market. Ya, kami ingin capital market yang lebih dalam. Ini sudah kami sampaikan secara eksplisit. Kami ingin pasar modal yang lebih sehat dan lebih baik," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa gejolak pasar saat ini semata disebabkan oleh praktik "goreng saham". Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada sistem dan aturan yang dibuat regulator. (wid,ist,kum/dya)

domestik.

Meski demikian, Prajogo masih bertahan sebagai orang terkaya nomor satu di Indonesia, unggul atas pesaing terdekatnya di daftar konglomerat nasional.

Tekanan serupa juga dialami Low Tuck Kwong, pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Dengan total kekayaan sekitar Rp403,91 triliun, hartanya turun Rp11,2 triliun dalam sehari, meski secara ytd masih mencatat kenaikan sekitar Rp5,02 triliun. Pergerakan yang kontras ini menunjukkan bahwa volatilitas jangka pendek belum sepenuhnya menghapus akumulasi keuntungan yang dibukukan sebelumnya.

Sementara itu, di sektor perbankan, koreksi pasar terasa lebih nyata. Budi Hartono mencatat kekayaan sekitar Rp320,11 triliun, menyusut Rp18,4 triliun dalam sehari, meski masih menguat Rp40,1 triliun secara ytd. (wid,ist,blo/dya)